

Judul : Tertibkan sistem pengangkutan batubara pemakai biosolar di Jambi
Tanggal : Kamis, 07 April 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 12

BBM BERSUBSIDI

Tertibkan Sistem Pengangkutan Batubara Pemakai Biosolar di Jambi

JAMBI, KOMPAS — Praktik pesan-antar yang marak dalam sistem pengangkutan hasil tambang batubara di Jambi turut memicu persoalan kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi. Pemerintah perlu menertibkan praktik tersebut agar pemegang izin usaha pertambangan bertanggung jawab atas distribusi hasil tambang, termasuk penyediaan bahan bakar minyak nonsubsidi untuk armada angkutannya.

Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jambi Komisaris Besar Dhafi di Jambi, Rabu (6/4/2022), mengatakan, sistem pesan-antar dalam distribusi hasil tambang membuat pemilik tambang melepas tanggung jawabnya menyediakan bahan bakar minyak (BBM) bagi jasa angkutan.

Padahal, kata Dhafi, sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2817 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, jasa pengangkutan hasil tambang harus terintegrasi dalam izin usaha pertam-

ban (IUP). "Pemegang IUP harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan BBM bagi usaha pengangkutan hasil tambangnya hingga ke pelabuhan," ujarnya.

Selama ini, pemegang IUP tak menyuplai BBM sehingga truk batubara turut mengantre di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) guna membeli BBM bersubsidi, yaitu biosolar. Hal itu menciptakan rentetan persoalan karena truk logistik dan angkutan umum kesulitan membeli biosolar dan jalan raya pun lebih cepat rusak karena dilalui truk batubara dengan muatan berlebih.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismed Wijaya mengatakan, ada sekitar 6.000 truk pengangkut batubara beroperasi di Jambi. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.500 unit yang terdata pemerintah daerah. "Selebihnya belum terdata," ujarnya, Rabu.

Konsumsi naik

Di Jawa Timur, selisih harga biosolar dan BBM nonsubsidi

Pemegang IUP harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan BBM bagi usaha pengangkutan hasil tambangnya hingga ke pelabuhan.

hingga Rp 9.150 per liter memicu konsumsi biosolar naik 15 persen.

Deny Djukardi, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, menyatakan, konsumsi solar subsidi di Jatim sekitar 170.000 kiloliter (kl) per bulan. Namun, sejak Maret atau bulan lalu, konsumsi solar meningkat 15 persen atau menjadi 195.500 kl.

Saat ini, harga biosolar Rp 5.150 per liter. Adapun harga BBM nonsubsidi, yakni dextrite (CN51) Rp 12.950-Rp 13.550 per liter. Untuk produk Pertamina dex (CN 53) dijual Rp 13.700-Rp 14.300 per liter. "Sejak Maret telah terjadi peningkatan

konsumsi biosolar yang cukup signifikan," kata Deny.

Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Mulyono saat meninjau ketersediaan stok BBM di Jatim menyatakan, pihaknya berupaya mempercepat penyaluran pasokan, terutama biosolar, untuk mencegah kelangkaan. Penyaluran pasokan baru perlu dipercepat karena peningkatan konsumsi oleh masyarakat.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan, pemerintah mengabaikan momentum bulan puasa dan Lebaran yang diyakini meningkatkan pergerakan. "Jika biosolar terus langka, itu akan menghambat kelancaran distribusi logistik. Sumbatan ini bisa memicu gejolak harga," kata Adik.

Pembatasan

Sejumlah sopir dengan trayek melintasi ruas pantai utara Jawa Tengah mengeluhkan pembatasan pembelian biosolar di sejumlah SPBU. Suwitno, sopir angkutan barang, me-

ngeluhkan pembatasan pembelian biosolar Rp 100.000-Rp 200.000 per truk di sejumlah SPBU sepekan terakhir.

Dua kali dalam sepekan, Suwitno membutuhkan 230 liter biosolar untuk perjalanan pergi-pulang dari Tangerang, Banten, menuju Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pembatasan membuatnya harus singgah di 10 SPBU sepanjang perjalanan dari biasanya cukup 4 SPBU. "Kadang sudah antre panjang, pas sudah giliran saya, solarnya habis," ujarnya.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang Bambang Pranoto Purnomo mengungkapkan kelangkaan biosolar di wilayahnya beberapa waktu belakangan. Dia khawatir, kelangkaan terjadi sampai masa mudik Lebaran.

"Kalau biosolar langka, mau tak mau semuanya akan beralih (ke dextrite atau dex) yang harganya dua kali lipat lebih dari solar. Hal ini pasti akan berdampak pada naiknya harga tiket transportasi darat, termasuk harga tiket mudik," kata Bambang (ITA/BRO/XTI)